

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021.

Rencana Kerja ini memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang berupa capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Oktober 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	I. PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB	II. EVALUASI PELAKSANA RENJA SKPD TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
	2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	25
BAB	III. TUJUAN, SASARAN,	26
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	29
	3.3. Rumusan Program dan Kegiatan	32
BAB	IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	4.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	35
BAB	V. PENUTUP	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

B A B I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Kerja merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun per tahun selama kurun waktu lima tahun dan dibuat pada awal tahun. Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
25. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut/*break down* dari Rencana Strategis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah :

- 1.3.2.1 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah serta kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021.
- 1.3.2.2 Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021.
- 1.3.2.3 Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- 1.3.2.4 Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, maka uraian-uraian yang terdapat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun anggaran 2021.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2021 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan hasil pemetaan Nomenklatur Program/kegiatan terhadap Pemendagri No.90 Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penyediaan jaringan jasa listrik, telepon, internet dan air bersih	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kelengkapan administrasi perkantoran	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan listrik/penerangan	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah ketersediaan peralatan	60	48	12	12	100	12	60	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tangga	rumah tangga								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan majalah	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan minum	60	48	12	12	100	12	60	100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi program/kegiatan ke luar daerah	60	48	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah paket honorarium tenaga kontrak Dinas PP dan PA	24	24	-	-	-	-	24	100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi program/kegiatan Dinas PP dan PA	60	48	12	12	100	12	60	100
Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah Paket Publikasi hasil-hasil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	2	2	2	100	2	4	100
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Paket Pengelolaan Keuangan SKPD	24	24	-	-	-	-	24	100
Penataan Aset Pemda Provinsi Lampung	Jumlah data aset pada Dinas PP dan PA	2	2	-	-	-	-	2	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas								
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas	1	1	-	-	-	-	1	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Operasional	operasional								
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	20	20	-	-	-	-	20	100
Pengadaan Mebeluer	Jumlah Pengadaan mebeluer	15	15	-	-	-	-	15	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2	2	-	-	-	-	2	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45	34	11	11	100	11	45	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	81	51	30	30	100	30	81	100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah Peningkatan disiplin aparatur								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	225	225	-	-	-	-	225	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Ketersediaan jasa pendukung kelancaran pelaksanaan tugas								
Diklat Formal dan Bimtek PNS	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal dan bimtek PNS	14	4	10	10	100	10	14	100
Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	16	12	4	4	100	4	16	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Jumlah Dokumen Rencana dan realisasi kinerja								
Penyusunan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan APBD	42	34	8	8	100	8	42	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD	49	33	16	16	100	16	49	100
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN	Jumlah kelompok ekonomi kreatif perempuan pedesaan yang dibina								
Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kelompok Perempuan Usaha Kecil Pedesaan yang terpilih untuk mempromosikan hasil produknya pada Tingkat Nasional	9	9	-	-	-	-	9	100
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan	Jumlah perempuan pasca buta aksara, keluarga tenaga kerja perempuan, serta korban trafficking yang mengikuti pembinaan dan Bimtek	450	450	-	-	-	-	450	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan dan Penilaian Keberhasilan Bagi Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera(P3KSS), Gerakan Sayang Ibu dan Nakerwan	Jumlah kader P3KSS dan terpilihnya pemenang lomba P3KSS dan GSI tingkat Provinsi Lampung	75	64	11	11	100	11	75	100
Pembinaan bagi keluarga miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif	Jumlah keluarga miskin sebagai Pelaku Usaha Perempuan dalam menopang ekonomi keluarga	1420	990	450	450	100	450	1440	101.41
Pembinaan Pengembangan Desa Prima Berwawasan Lingkungan	Jumlah Pembinaan dan Bimtek terhadap 5 Desa Prima	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan peran Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Organisasi Wanita	15	11	4	4	100	4	15	100
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING, KDRT, DAN PELECEHAN SEKSUAL	Jumlah Implementasi kebijakan perundang-undangan tentang trafficking, KDRT, dan tindak kekerasan kepada seluruh pemangku kepentingan di kab/kota								
Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti FAD, FAN, KAI, dan Pembinaan KLA	1312	1252	60	60	100	60	1312	100
Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung	Jumlah pendampingan pelayanan , advokasi, sosialisasi, publikasi, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	425	386	151	151	100	151	537	126,35

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (Tesa) 129	Jumlah paket penyelenggaraan Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (Tesa) 129	40	40	-	-	-	-	40	100
Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah koordinasi dan Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	60	48	12	12	100	12	60	100
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK	Jumlah Operasional TKPP, Klinik Menopause dan UPT PKTK	60	48	12	12	100	12	60	100
Peningkatan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung	Jumlah peserta seminar Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Hak-hak Anak dan Upaya Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, serta pelaksanaan operasional Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Fasilitasi rumah Perlindungan Anak	330	190	140	140	100	140	330	100
Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dan Anak	Jumlah Pelayanan dan Pendampingan bagi Korban KDRT dan Anak	62	62	-	-	-	-	62	100
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Sosialisasi kebijakan/peraturan pusat dan	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah	daerah kepada kab/kota, SKPD terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak								
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota Layak Anak se Provinsi Lampung	24	9	15	15	100	15	24	100
Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan TeSA 129	Jumlah Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan, dan P2TP2A	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Kader dan Fasilitator PATBM	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi dan Operasional Pelayanan UPT PKTK dan Klinik Menopause	Jumlah Pelayanan bagi Korban tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta bagi Perempuan Pra dan Pasca Menopause.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap KDRT serta Pelaksanaan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Kampanye anti kekerasan dan sosialisasi pencegahan dan penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, Investigasi, pendampingan kasus trafficking serta implementasi kebijakan mengenai ketenagakerjaan serta pelaksanaan Forum Kerjasama	Jumlah GT PP-TPPO yang terbentuk di 15 Kab/Kota, Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah MPU 10 Provinsi	dan Pelaksanaan MPU								
Sosialisasi dan Monitoring tentang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	200	130	70	70	100	70	200	100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Jumlah peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan								
Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	jumlah dokumen proseding laporan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Pemerintah pusat	160	128	32	32	100	32	160	100
Peningkatan Sumberdaya Informasi Berbasis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah tiang dan visual/gambar.	11	11	-	-	-	-	11	100
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Jumlah focal point dan pokja PUG kab/kota se Provinsi Lampung								
Rapat Koordinasi Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten/Kota	50	50	-	-	-	-	50	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan Analisis Gender Bagi Perencana SKPD Prov dan Kab/Kota	Jumlah Pejabat SKPD Provinsi, Badan Pemberdayaa Perempuan dan KB Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP)	30	30	-	-	-	-	30	100
Peningkatan Kesejahteraan Perempuan melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah pembinaan kelompok tani, kelompok usaha bersama, kelompok usaha kecil di kab/kota	15	15	-	-	-	-	15	100
Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan	Jumlah informasi tentang kesetaraan Gender kepada Masyarakat	2875	2875	-	-	-	-	2875	100
Peningkatan Kapasitas PUG bagi Legislatur Prov dan 15 Kab/Kota tentang Perencanaan Pembangunan dan Rencana Anggaran Daerah yang berkeadilan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender	600	600	-	-	-	-	600	100
Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Proseding Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan	2	2	-	-	-		2	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program s/d Akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anugerah Parahita Ekapraya	Anugerah Parahita Ekapraya								
Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG	Jumlah SKPD dan PPKB kab/kota yang mengikuti TOT PPRG	275	125	150	150	100	150	275	100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah Publikasi informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
Pengembangan Ketahanan Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia	Pembinaan kader BKR dan BKL	-	-	-	-	-	-	-	-
Up dating Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Data pilah gender dan anak	75	60	15	15	100	15	75	100
Membangunan Jejaring Informasi dan Interaksi Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah media sosial publik mengenai Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	270	60./ 6	210	210	100	210	270	100
Pengembangan Ketahanan Keluarga terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB)	Jumlah pemenang kader & pengelola kelompok BKB tingkat Provinsi Lampung	29	29	-	-	-	-	29	100
Pendidikan Politik Berwawasan Gender	Jumlah peningkatan pemahaman politik berwawasan gender	60	60	-	-	-	-	60	100
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Database Gender dan Anak	1	1	-	-	-	-	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Adapun kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	10
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Persentase SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	36.3% (20)	63.6% (35)	100% (55)	100% (55)	
		Persentase Peningkatan Keterampilan Perempuan Miskin Pedesaan	67.91% 1270 Orang	83.96% 1570 Orang	100% 1870 Orang	101.07% 1890 Orang	
	Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak se Provinsi Lampung	3 Kab/ Kota	-	6 Kab/ Kota	7 Kab/kota (116,67%)	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	80%	80%	82%	82% (100%)	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki 3 Sasaran strategis dan 4 Indikator Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
 - a. Persentase SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender didukung melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Kegiatan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG, sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi 100% (55SKPD) yang telah mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender dari 55 SKPD (target ditetapkan pada tahun 2015) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - b. Persentase Peningkatan Keterampilan Perempuan Miskin Pedesaan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan dan Kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif, sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan Bimtek kepada 1890 perempuan (101.07%) ((persentase didapat dari realisasi target kumulatif selama 5 tahun sebanyak 1890 orang dibagi target kumulatif selama 5 tahun 1870 orang.
2. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak
 - a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak se-Provinsi Lampung dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Pelecehan Seksual dengan kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target kinerja pada tahun 2015 adalah 1 kabupaten dengan hasil 1 kabupaten yaitu **Lampung Selatan** mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Lampung memiliki target 3 Kabupaten/Kota, hasil adalah 1 kabupaten yang mendapatkan predikat Layak Anak yaitu **Kabupaten Lampung Selatan**, sehingga capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 33.33%. pada tahun 2018 target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 3 kabupaten/Kota dengan hasil 3 Kabupaten dan Kota yang memperoleh predikat layak anak yaitu **Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung**. Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menargetkan 6 Kabupaten/ Kota untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, Realisasi Kinerja 116,67%, Hasil adalah Provinsi Lampung meraih **Penghargaan Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak** pada puncak acara Peringatan Hari Anak Nasional **beserta 7 (tujuh)** Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu : **Lampung Timur dan Bandar Lampung** dengan predikat **Tingkat Madya**, sedangkan **Lampung Selatan, Pringsewu, Metro, Way Kanan, dan Lampung Tengah** mendapatkan Predikat **Tingkat Pratama**.

3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Pelecehan Seksual dengan kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung, sampai dengan Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A telah melaksanakan penanganan dan pendampingan terhadap 537 kasus yang terdiri dari 371 kasus kekerasan terhadap anak dan 166 kasus kekerasan terhadap perempuan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Dalam penentuan serta pelaksanaan program dan kegiatan, terjalin koordinasi dengan kabupaten/kota. Koordinasi yang dilakukan dengan kab/kota yaitu mensinkronkan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara Provinsi dan Kab/Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kab/kota. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal, sehingga data kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PPPA Provinsi Lampung belum terkelola dengan baik;

- b. Sumber daya manusia yang belum optimal kinerjanya, menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas pencapaian kinerja, selain itu masih kurangnya motivasi kerja dan tingkat kedisiplinan SDM sehingga perlu pembinaan intensif dari atasan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 memuat program/kegiatan pembangunan yang mengacu pada Renstra Dinas PPPA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan maka program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program/kegiatan prioritas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Berikut review terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.296.631.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.296.631.700
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Penyusunan dokumen perencanaan	17 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Penyusunan dokumen perencanaan	17 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen pelaporan	8 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen pelaporan	8 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.853.130.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.853.130.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Pembayaran Gaji ASN	14 Bulan	8.553.130.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Pembayaran Gaji ASN	14 Bulan	8.553.130.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	250.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	12 Bulan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	12 Bulan	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bandar Lampung	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	25.000.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.786.808.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.786.808.650
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	28.280.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	28.280.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	102 unit	150.230.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	102 unit	150.230.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	15.156.650	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	15.156.650
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	33.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	33.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	79.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	79.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	12 Bulan	1.456.142.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	12 Bulan	1.456.142.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.161.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.161.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan	53 unit	300.161.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Penyediaan peralatan	53 unit	300.161.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				397.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				397.040.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Penyediaan jasa komunikasi listrik	12 Bulan	156.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Penyediaan jasa komunikasi listrik	12 Bulan	156.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	241.040.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	241.040.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				659.492.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				659.492.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	11 Unit	399.271.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	11 Unit	399.271.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin peralatan kantor	150 unit	58.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin peralatan kantor	150 unit	58.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung	201.261.050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 gedung	201.261.050
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				388.145.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				388.145.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				162.926.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				162.926.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10 kab/kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data APE, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Validasi dan Verifikasi data APE	450 orang	162.926.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10 kab/kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data APE, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Validasi dan Verifikasi data APE	450 orang	162.926.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	13 kab/kota	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif	377 orang	225.219.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	13 kab/kota	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif	377 orang	225.219.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.273.390.950	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.273.390.950
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas TPPO	120 orang	76.781.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas TPPO	120 orang	76.781.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Pelaksanaan Operasional UPTD PPA	12 bulan	465.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Pelaksanaan Operasional UPTD PPA	12 bulan	465.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Jumlah Bulan Layanan Pengaduan korban	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Jumlah Bulan Layanan Pengaduan korban	12 bulan	15.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	329.564.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	329.564.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				387.045.950	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				387.045.950
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Penanganan Medis Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di R.S Abdul Moeloek berupa Layanan Medis Psikologi, Visum dan Obat-obatan.	285 Orang	254.279.950	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Penanganan Medis Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di R.S Abdul Moeloek berupa Layanan Medis Psikologi, Visum dan Obat-obatan.	285 Orang	254.279.950
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Jumlah Bulan Pelayanan Pendampingan kasus	12 Bulan	79.366.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	Jumlah Bulan Pelayanan Pendampingan kasus	12 Bulan	79.366.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Bulan Pencegahan Pendampingan kasus	12 Bulan	53.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Bulan Pencegahan Pendampingan kasus	12 Bulan	53.400.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				416.100.400	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				416.100.400
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				416.100.400	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				416.100.400
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	15 kab/kota	Rapat Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus BKOW, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP)	100 orang	416.100.400	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	15 kab/kota	Rapat Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus BKOW, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP)	100 orang	416.100.400
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				359.027.200	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				359.027.200
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				359.027.200	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				359.027.200
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Rapat Simfoni dengan Kabupaten/Kota	1 dokumen	121.180.400	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Bandar Lampung	Pelaksanaan Rapat Simfoni dengan Kabupaten/Kota	1 dokumen	121.180.400
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab. Pesibar, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Mesuji	Rakor Forum PUSPA ke Kab/Kota	100 orang	237.846.800	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab. Pesibar, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Mesuji	Rakor Forum PUSPA ke Kab/Kota	100 orang	237.846.800
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.352.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.352.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	pembekalan FAD dan HAN	335 orang	154.528.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung	pembekalan FAD dan HAN	335 orang	154.528.000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	15 Kab./kota Se-Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pelatihan tenaga Layanan Konselor pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) se Prov. Lampung	45 orang	66.114.000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	15 Kab./kota Se-Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pelatihan tenaga Layanan Konselor pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) se Prov. Lampung	45 orang	66.114.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab./Kota	Pelaksanaan Rapat tentang Validasi Data Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2021	200 orang	273.890.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab./Kota	Pelaksanaan Rapat tentang Validasi Data Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2021	200 orang	273.890.000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 kab/kota (Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara dan Waykanan)	Pembentukan dan TOT Kader PATBM Kab.Kota	175 orang	91.098.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 kab/kota (Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara dan Waykanan)	Pembentukan dan TOT Kader PATBM Kab.Kota	175 orang	91.098.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pendampingan kasus	12 bulan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pendampingan kasus	12 bulan	20.000.000

No	Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	Program Pengendalian Penduduk				48.652.000	Program Pengendalian Penduduk				48.652.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				48.652.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				48.652.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Utara, kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan.	sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Dinas PP dan PA Provinsi Lampung	125 orang	48.652.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Utara, kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan.	sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Dinas PP dan PA Provinsi Lampung	125 orang	48.652.000
IX	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				61.302.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				61.302.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab.Lampung Selatan	sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	240 orang	61.302.000	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab.Lampung Selatan	sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	240 orang	61.302.000
X	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)				176.086.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)				176.086.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				120.380.000	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				120.380.000

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU SETELAH REFOCUSING	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Lokasi dari Kegiatan di Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, , Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pringsewu	sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	300 orang	120.380.000	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Lokasi dari Kegiatan di Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, , Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pringsewu	sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	300 orang	120.380.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	
04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bandar Lampung	Sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	40 orang	55.706.000	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bandar Lampung	Sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	40 orang	55.706.000	
Total Pagu					15.624.965.250	Total Pagu					15.624.965.250

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga, Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak, Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat, Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program-program tersebut dianggarkan dalam rangka untuk meningkatkan anggaran responsif gender, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatnya capaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung.

B A B III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN tahun 2019-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan Meningkatkan Kualitas Anak, dan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- b. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- c. Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
- d. Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilih; dan
- f. Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;

2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup:

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
- b. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup:

- a. Penguatan layanan yang ramah terhadap anak;
- b. Penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh anak, termasuk yang berada pada kondisi khusus;
- c. Penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak;
- d. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan;
- e. Penguatan upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk perkawinan anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (bpta); dan
- f. Peningkatan efektivitas kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas sdm, penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan.

4. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mencakup:

- a. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) termasuk TPPO;
- b. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat dalam mencegah dan memperoleh layanan KtP termasuk TPPO;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarunit layanan korban KtP termasuk TPPO;
- d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah, dan dunia usaha dalam penanganan dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO;

- e. penguatan sistem penanganan dan penegakan hukum kasus KtP termasuk TPPO; serta
- f. penguatan data terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun anggaran 2021, maka dirumuskan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada serangkaian proses pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta mengantisipasi terhadap dampak-dampak yang kemungkinan dihadapi Perangkat Daerah dalam perumusan dan pengambilan keputusannya. Adapun arah kebijakan tersebut meliputi :

- a. Menguatkan pemahaman dan komitmen OPD dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender/ PPRG (peningkatan anggaran)
- b. Menguatkan kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
- c. Menguatkan jejaring melalui peningkatan jumlah instansi yang bekerjasama dengan Dinas PPPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan jumlah Lembaga Masyarakat (non pemerintah) yang difasilitasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan persentase pelayanan tuntas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- f. Meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- g. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas, lingkungan ramah anak).
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak
- i. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi PUHA terhadap pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- j. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Persentase korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif

2. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Cakupan KB Aktif (CPR)

Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	3,20
		Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	100
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	68,24

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024 tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra	
				Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20
		b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	100	100	100	100
		c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	a. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2021, ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak. Program kegiatan dimaksud yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan/Material

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
- A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**
 1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
 - B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**
 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
 - A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**
 - 1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
 - A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**
 - 1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
- VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
 - A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
 - A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

VIII. Program Pengendalian Penduduk

A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

IX. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal

1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

X. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2021 serta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari 10 Program, 22 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Rencana 2021							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				12.296.631.700	APBD			12.353.150.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	APBD			200.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan	Bandar Lampung	17 Dokumen	150.000.000	APBD		17 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Penyusunan Dokumen pelaporan	Bandar Lampung	8 Dokumen	50.000.000	APBD		8 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.853.130.000	APBD			9.178.150.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	Bandar Lampung	14 Bulan	8.553.130.000	APBD		14 Bulan	8.378.150.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	250.000.000	APBD		12 Bulan	725.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksanaan Pelaporan capaian keuangan	Bandar Lampung	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	APBD			50.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	APBD			125.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Bandar Lampung	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	30 Orang	25.000.000	APBD		5 Orang	75.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.786.808.650	APBD			1.498.959.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	28.280.000	APBD		12 Bulan	28.280.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	102 unit	150.230.000	APBD		78 unit	192.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	12 Bulan	15.156.650	APBD		12 Bulan	8.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bandar Lampung	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Bandar Lampung	12 Bulan	33.000.000	APBD		12 Bulan	33.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	12 Bulan	79.000.000	APBD		12 Bulan	79.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordiansi dan konsultasi	Bandar Lampung	12 Bulan	1.456.142.000	APBD		12 Bulan	1.133.179.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.161.000	APBD			135.740.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan	Bandar Lampung	53 unit	300.161.000	APBD		17 unit	135.740.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				397.040.000	APBD			557.070.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi listrik	Bandar Lampung	12 Bulan	156.000.000	APBD		12 Bulan	148.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bandar Lampung	12 Bulan	241.040.000	APBD		12 Bulan	409.070.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				659.492.050	APBD			608.231.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Bandar Lampung	11 Unit	399.271.000	APBD		15 Unit	399.271.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin peralatan kantor	Bandar Lampung	150 unit	58.960.000	APBD		113 unit	58.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin gedung kantor	Bandar Lampung	1 gedung	201.261.050	APBD		1 gedung	150.000.000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				388.145.000	APBD			475.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				162.926.000	APBD			225.000.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data APE, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Validasi dan Verifikasi data APE	10 kab/kota	450 orang	162.926.000	APBD		450 orang	225.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				225.219.000	APBD			250.000.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif	13 kab/kota	377 orang	225.219.000	APBD		325 orang	250.000.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.273.390.950	APBD			1.176.800.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				541.781.000	APBD			617.410.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas TPPO	Bandar Lampung	120 orang	76.781.000	APBD		140 orang	262.410.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Operasional UPTD PPA	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	12 bulan	465.000.000	APBD		12 Bulan	355.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				344.564.000	APBD			282.044.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Layanan Pengaduan korban	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	20.000.000

No	Rencana 2021							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan penyediaan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Bandar Lampung	12 bulan	329.564.000	APBD		12 bulan	262.044.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				387.045.950	APBD			277.346.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Penanganan Medis Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di R.S Abdul Moeloek berupa Layanan Medis Psikologi, Visum dan Obat-obatan.	Bandar Lampung	285 Orang	254.279.950	APBD		250 Orang	200.540.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan Pelayanan Pendampingan kasus	Bandar Lampung	12 Bulan	79.366.000	APBD		12 Bulan	76.806.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pencegahan Pendampingan kasus	Bandar Lampung	12 Bulan	53.400.000	APBD		0	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				416.100.400	APBD			525.000.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				416.100.400	APBD			525.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Rapat Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus BKOW, Pelaksanaan Rapat Rutin antar pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP)	15 kab/kota	100 orang	416.100.400	APBD		135 orang	525.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				359.027.200	APBD			500.000.000
	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				359.027.200	APBD			500.000.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Pelaksanaan Rapat Simfoni dengan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 dokumen	121.180.400	APBD		1 dokumen	198.919.000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rakor Forum PUSPA ke Kab/Kota	Kab. Pesibar, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Mesuji	100 orang	237.846.800	APBD		100 orang	301.081.000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				494.352.000	APBD			700.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				494.532.000	APBD			700.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	pembekalan FAD dan HAN	Bandar Lampung	335 orang	154.528.000	APBD		95 orang	199.216.000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pelatihan tenaga Layanan Konselor pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) se Prov. Lampung	15 Kab./kota Se-Provinsi Lampung	45 orang	66.114.000	APBD		250 orang	136.411.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rapat tentang Validasi Data Pusat Pembelajaran Kaluarga Tahun 2021	Kab./Kota	200 orang	273.890.000	APBD		350 orang	364.373.000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				111.098.000	APBD			175.000.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				91.098.000	APBD			150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Pembentukan dan TOT Kader PATBM Kab.Kota	5 kab/kota (Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara dan Waykanan)	175 orang	91.098.000	APBD		105 orang	150.000.000

No	Rencana 2021							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000	APBD			25.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pendampingan kasus	Kab./Kota Se-Provinsi Lampung	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	25.000.000
VIII	Program Pengendalian Penduduk				48.652.000	APBD			90.000.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				48.652.000	APBD			90.000.000
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Dinas PP dan PA Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Utara, kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan.	125 orang	48.652.000	APBD		40 orang	90.000.000

No	Rencana 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				61.302.000	APBD			140.000.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal				61.302.000	APBD			140.000.000
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Kab.Lampung Selatan	240 orang	61.302.000	APBD		200 orang	140.000.000
X	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)				176.086.000	APBD			270.000.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				120.380.000	APBD			180.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	Lokasi dari Kegiatan di Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, , Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pringsewu	300 orang	120.380.000	APBD		300 orang	180.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Rencana 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU 2021	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.706.000	APBD			90.000.000
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	Bandar Lampung	40 orang	55.706.000	APBD		45 orang	90.000.000
	Total Pagu				15.624.965.250			16.404.950.000	

B A B V
PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi saat ini yang diarahkan pada upaya penguatan dan akselerasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih fokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan sasaran masing-masing Program/Kegiatan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Oktober 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19780419 199612 2 001